

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang diinginkan. Pembangunan yang dimaksud lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraannya. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi kelestarian manusia dan alam (Subandi, 2011).

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan yang dimaksud diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Jhingan, 2016).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers dalam Harun et al. (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu

sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut Rostow dalam Halim (2004), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Harun et al., 2011).

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu. Dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Salah satunya dengan kehadiran dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut Moldan dan Dahl (2007:2), memberikan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas. Tiga pilar pembangunan tersebut di antaranya dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat.

Di dalam dimensi ekonomi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. Sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

Adapun dimensi lingkungan menurut Mohan Munasinghe (1993) dalam Rogers, et. al (2008) memiliki tujuan-tujuan antara lain upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam. Dengan demikian tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada ketiga dimensi di atas yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*) serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*).

Dalam perkembangannya, Keiner (2001) memperkenalkan empat dimensi dari Pembangunan Berkelanjutan yaitu dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan *institutional dimension*/dimensi kelembagaan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa dimensi sosial budaya terbagi atas modal sumber daya manusia dan kelembagaan atau institusi. Suatu sistem atau organisasi yang bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan harus mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif. Hal ini hanya dapat dicapai dengan adanya kelembagaan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih

baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu, pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat akan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah (Jhingan, 2016).

## **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

### **2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). UNDP mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep ini tidak hanya menghitung aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi lebih terfokus terhadap peningkatan produk nasional bruto

(PNB) daripada memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui terciptanya kesempatan kerja.

Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik, artinya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Sehingga menjadi sulit bagi sebuah negara dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama dalam pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dikutip dari UNDP (1995:103), lima poin penting dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk seperti berumur panjang dan sehat, dan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.
- b. pembangunan manusia tidak hanya pada upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.
- c. pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

- d. pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
- e. pembangunan harus mengutamakan masyarakat sebagai pusat perhatian.

Menurut UNDP, IPM ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, pembangunan dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Badan Pusat Statistik, 2022).

IPM adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia sebagaimana yang diungkapkan dalam teori *human capital* oleh Gary S Becker jika manusia bukan hanya sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya (Ramadanisa, 2022).

### **2.1.2.2 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia**

Sebelum perhitungan IPM, setiap komponen dilakukan perhitungan indeksnya terlebih dahulu. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Indeks Angka Harapan Hidup

Indeks angka harapan hidup diperoleh dengan cara membandingkan angka yang diperoleh dengan angka yang sudah distandarkan oleh BPS dan UNDP. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

b. Indeks Pendidikan

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AMH = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100$$

Sedangkan indeks angka melek huruf dirumuskan:

$$\text{Indeks AMH} = \frac{AMH - AMH_{\min}}{AMH_{\max} - AMH_{\min}} \times 100$$

Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dengan menggabungkan variabel yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sebelum dilakukan perhitungan rata-rata lama sekolah, terlebih dahulu diperlukan perhitungan lama sekolah masing-masing individu. Selanjutnya rata-rata sekolah dapat dihitung dengan rumus:

$$RLS = \frac{\sum f_i X j_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

RLS : rata-rata lama sekolah

$F_i$  : frekuensi penduduk 15 tahun keatas jenjang pendidikan ke-i

$J_i$  : lama sekolah untuk masing-masing jenjang yang pernah pendidikan yang ditamatkan atau yang pernah diduduki

I : jenjang pendidikan (BPS Yogyakarta, 2014:14).

Indeks RLS dirumuskan dengan rumus:

$$\text{Indeks RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Untuk memperoleh indeks pendidikan, indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah digabungkan menjadi satu dengan rumus:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3}(\text{Indeks AMH}) + \frac{1}{3}(\text{Indeks RLS})$$

### c. Indeks Daya Beli

Dalam menghitung konsumsi per kapita riil atau tingkat daya beli penduduk, digunakan beberapa tahap seperti berikut:

- a) menghitung pengeluaran konsumsi per kapita (A);
- b) mendapatkan pola konsumsi Susenas untuk mendapatkan pola IHK yang sesuai (B).
- c) melakukan deflasi nilai A dengan IHK sesuai (C);
- d) menghitung standar daya beli penduduk. Data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini meliputi harga dan kuantum dari satu paket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas. Ke-27 komoditi tersebut meliputi beras, tepung terigu, singkong, ikan tuna/cakalang, ikan

teri, daging sapi, daging ayam, telur, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, pepaya, kelapa, gula, kopi, garam, merica, mie instan, rokok kretek, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah.

- e) Membagi dengan C dengan PPP per unit (D);
- f) Menyesuaikan nilai dengan formula D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal dari D (E). Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

<b>KOMPONEN</b>	<b>MINIMUM</b>	<b>MAKSIMUM</b>	<b>KETERANGAN</b>
Angka Harapan Hidup (tahun)	20	85	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	18	Standar UNDP
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	0	15	Standar UNDP
Daya Beli (rupiah)	1.007.436	25.572.352	Menggunakan PNB riil per kapita yang telah disesuaikan

*Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)*

Untuk menghitung nilai IPM menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1) + (\text{Indeks } X_2) + (\text{Indeks } X_3)$$

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Indeks  $X_1$  : Indeks Kesehatan

Indeks  $X_2$  : Indeks Pendidikan

Indeks  $X_3$  : Indeks Pendapatan Per kapita

UNDP membagi tingkatan pembangunan manusia dalam empat golongan yang dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Peringkat Kinerja Pembangunan**

<b>NO</b>	<b>IPM</b>	<b>KET.</b>
1	$IPM \geq 80$	SANGAT TINGGI
2	$70 \leq IPM < 80$	TINGGI
3	$60 \leq IPM < 70$	SEDANG
4	$IPM < 60$	RENDAH

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)*

### 2.1.3 PDRB Per kapita

#### 2.1.3.1 Pengertian PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah (BPS). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakatnya. Adapun formula PDRB per kapita sebagai berikut:

$$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

### **2.1.3.2 Manfaat PDRB Per kapita**

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita memiliki beberapa manfaat, antara lain, indikator standar hidup dari tahun ke tahun di wilayah tertentu, pembandingan tingkat kesejahteraan, pedoman pemerintah mengambil kebijakan ekonominya ataupun memperbaiki regulasi yang ada demi perbaikan kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

PDRB per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu wilayah dari tahun ke tahun. Apabila PDRB per kapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat pula. Namun, untuk memastikan apakah kesejahteraan masyarakat memang benar-benar meningkat, namun perlu memperhitungkan PDRB per kapita secara riil, yaitu peningkatan PDRB per kapita dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi (Sukirno, 2011).

### **2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen**

Model pertumbuhan endogen ini menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap bersifat endogen dan pertumbuhan ekonomi merupakan keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pengertian modal tidak hanya modal fisik saja, tetapi juga menyangkut modal insani atau *human capital*.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi endogen, perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarnegara disebabkan karena adanya alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fiskal, modal insani dan infrastruktur. Lucas (1998) menekankan pentingnya modal insani dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Mankiw, Romer dan Weil (1992) mengungkapkan kelemahan teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Salah satunya yaitu adanya asumsi hanya ada satu barang yang tersedia dalam negara, peran pemerintah yang diabaikan, pertumbuhan tenaga kerja, depresiasi dan perkembangan teknologi. Untuk memperbaiki kelemahan teori pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ketiga tokoh tersebut menambahkan peran teknologi endogen dan modal insani sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus**

##### **2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi merupakan perwujudan dari otonomi daerah yaitu kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Azizah, 2017). Desentralisasi fiskal ini menurut teori *Fiscal Federalism* diperkenalkan oleh Friedrich August Hayek pada tahun 1945 merupakan kunci dalam hal pembangunan. Teori tersebut menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Haryanto (2019), teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 (23), dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan pengembangan sarana dan prasarana fisik. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyedia pelayanan dasar masyarakat yang telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAK dialokasikan untuk membantu daerah, membantu

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana, pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan (Halim, 2016).

#### **2.1.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus**

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Maka demikian tidak semua daerah dapat menerima alokasi (Yani, 2006).

##### a) Kriteria Umum,

Ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional mendapatkan alokasi DAK.

Kemampuan Daerah = Penerimaan Umum - Belanja Pegawai Negeri Sipil  
Daerah

$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})$$

(Yani, 2008)

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBH DR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

b) Kriteria Khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud seperti daerah perbatasan barat dengan negara lain, pesisir kepulauan daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk ketahanan pangan. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

c) Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK yang mana perumusannya berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Setelah dirumuskan, menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

### **2.1.4.3 Mekanisme Pengalokasian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.

Dana alokasi khusus itu sendiri terdiri dari DAK fisik dan non fisik, serta hibah kepada daerah.

- a. DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- b. DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

#### **2.1.4.4 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus**

Menurut Halim (2016), dana alokasi khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Berikut adalah arah kegiatan dari DAK:

##### **a. DAK Bidang Pendidikan**

DAK bidang pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Lingkup kegiatan DAK bidang pendidikan dibagi menjadi kegiatan SD, SMP, SMA, SKB, SMK, dan SLB yang secara ringkas disebutkan sebagai berikut: Rehabilitasi prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan prasarana ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan sebagainya; peningkatan sarana mutu pendidikan, seperti: peralatan IPS, alat peraga matematika, laboratorium komputer, pengadaan peralatan praktik, pengadaan media pendidikan, dan pengadaan sarana seni budaya; pengadaan sarana dan prasarana PAUD untuk TK Negeri, seperti: pengadaan alat permainan edukatif PAUD, dan pengadaan koleksi PAUD; pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK berupa pembangunan ruang praktik Siswa dalam mendukung sektor unggulan dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Ketahanan pangan; 3. Pariwisata; 4. Energi; 5. Industri/Industri kreatif.

b. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif, mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga, tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Lingkup kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar terdiri atas kegiatan: renovasi puskesmas; pembangunan baru puskesmas/puskesmas perawatan; pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas; dan sebagainya.

c. DAK Bidang Air Minum

DAK bidang air minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi. Kebijakan bidang air minum diharapkan dapat mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik di daerah khusus maupun di daerah afirmasi.

d. DAK Bidang Sanitasi

DAK bidang sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan

truk tinja pada kabupaten atau kota yang mempunyai dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

e. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman

DAK bidang perumahan dan pemukiman diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus. DAK bidang ini bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas untuk pencegahan dan penanganan kawasan kumuh.

f. DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah

DAK bidang industri kecil dan menengah dialokasikan untuk mendanai kegiatan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional. Diharapkan dapat meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing sentra IKM. Lingkup bidang industri kecil dan menengah terdiri dari pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM.

g. DAK Bidang Pertanian

DAK bidang pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian. Pemanfaatan DAK ini juga ditujukan untuk: mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis; peningkatan kemampuan produksi bahan pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; serta peningkatan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

#### h. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK bidang kelautan dan perikanan dialokasikan untuk mendukung sasaran prioritas nasional pengurangan kesenjangan antarwilayah, melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

#### i. DAK Bidang Pariwisata

DAK bidang pariwisata dialokasikan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata; membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenities, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

#### j. DAK Bidang Jalan

DAK bidang jalan dialokasikan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional seperti ketahanan pangan (lumbung pangan), pariwisata (10 destinasi prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN), kawasan industri, konektivitas, daerah afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan). Lingkup kegiatan bidang jalan untuk kabupaten/kota diantaranya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan.

k. DAK Bidang Irigasi

DAK bidang irigasi dialokasikan untuk mendukung kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 2 (tiga) juta ha.

l. DAK Bidang Pasar

DAK bidang pasar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui: pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; pembangunan Depo Gerai Maritim; optimalisasi sistem resi gudang; penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal; serta penyediaan peralatan uji mutu barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).

m. DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK bidang lingkungan hidup diutamakan mendukung prioritas nasional kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi, pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi. Selain itu untuk mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,5-68,5.

DAK bidang kehutanan dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dengan target 345 KTH; penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di HR dan sipil teknis di KPH, Tahura, dan hutan kota; pengembangan

sarana dan prasarana untuk peningkatan tata kelola hutan dan konservasi pada 371 KPH dan 26 Tahura/Hutan kota.

n. DAK Bidang Transportasi

DAK bidang transportasi diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan wilayah Papua. Lingkup kegiatan bidang transportasi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan mode transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintah.
- 2) Pembangunan dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang.

## **2.1.5 Kemiskinan**

### **2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan yang layak, meliputi pangan dan non pangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencapai kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup (Suryawati, 2004).

Kemiskinan sering diartikan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dinyatakan miskin bila ditandai dengan tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang rendah sehingga muncul lingkaran ketidakberdayaan. Menurut Soekanto dalam Senewe (2021), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan juga diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang tinggi yang sesuai dengan standar yang ada di masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana (Senewe, 2021).

Selanjutnya, Supriyatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin jika ditandai oleh rendahnya produktivitas kerja, pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan ketidakberdayaan.

Menurut Nurkse (1953) secara sederhana ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar

garis kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap sandang, pangan dan papan untuk menjamin keberlangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

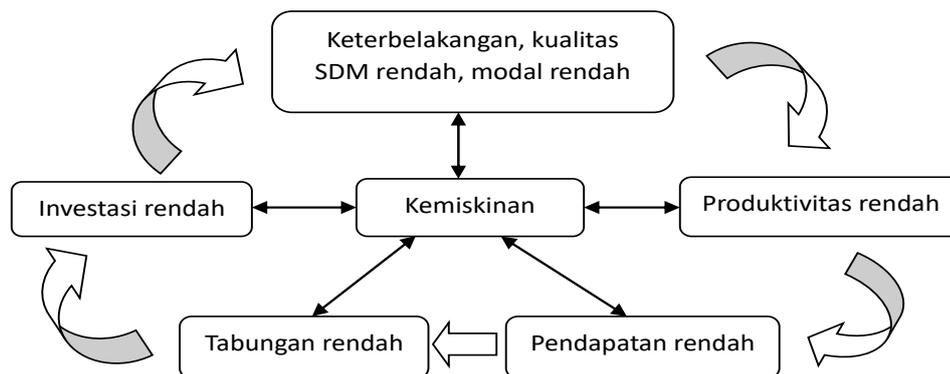
Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan, apabila telah memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya. Apabila sikap seseorang atau kelompok masyarakat tersebut tidak ada niatan untuk berusaha meningkatkan standar kehidupannya dari pihak lain untuk membantunya atau dengan kata lain seseorang atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

#### **2.1.5.2 Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meirer**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk ditanggulangi, khususnya bagi negara-negara berkembang. Dalam teorinya, Meier dan Baldwin (1972) menjelaskan bagaimana lingkaran kemiskinan terjadi sehingga masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan. Kemiskinan melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan saling berkesinambungan.



**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Kemiskinan**

Gambar 2.1 menjelaskan tentang lingkaran kemiskinan menjelaskan bagaimana kemiskinan terjadi, yang diawali dengan keterbelakangan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah serta akses modal yang rendah. Keterbelakangan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas menurun karena rendahnya aktivitas *supply* dan *demand* pada pasar tenaga kerja, sebagai akibat tidak bertemunya permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, maka akan semakin rendah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai dana untuk ditabung maupun diinvestasikan yang akhirnya menimbulkan tingkat *saving* dan tingkat investasi rendah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan modal yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat modal rendah maka akan sulit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengalami keterbelakangan. Dalam lingkaran ini kemiskinan diposisikan sebagai sebab sekaligus akibat dari terjadinya fenomena kemiskinan itu sendiri baik langsung maupun tidak langsung.

## 2.1.6 Ketimpangan

### 2.1.6.1 Pengertian Ketimpangan

Menurut Todaro & Stephen C. Smith (2003), ketimpangan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Sedangkan menurut Baldwin, ketimpangan merupakan perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Kuncoro, 2004).

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh North (1990), dalam analisisnya mengenai teori pertumbuhan *neo-klasik*. Di dalam teori tersebut dimunculkan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesis ini dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik. Dalam hipotesis Neo-Klasik pada awal proses pembangunan suatu negara ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan, proses ini akan terus berjalan sampai kepada ketimpangan berada di titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan sehingga di negara-negara berkembang ketimpangan pembangunan antar wilayahnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju,

dengan kata lain, maka kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik (kurva Kuznet).

### 2.1.6.1 Ukuran Ketimpangan

*Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran ini pertama kali dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya yang berjudul “*Variability and Mutability*” (Machmud, 2016). *Gini ratio* dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasainya dan yang lainnya tidak sama sekali. Walaupun demikian, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia bernama Michael Todaro menyebutkan bahwa:

- a. *Gini ratio* antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang
- b. *Gini ratio* antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang
- c. *Gini ratio* antara 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan yang tinggi

Menurut Todaro & Smith (2006), *Gini ratio* digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah secara keseluruhan.

Sedangkan formula *Gini ratio* yaitu:

$$G = 1 - \sum_1^n (X_i + 1)(Y_i + Y_i + 1)$$

$$0 < G < 1$$

$$G = 1 - \sum_1^n f_i (Y_i + Y_i + 1)$$

Keterangan:

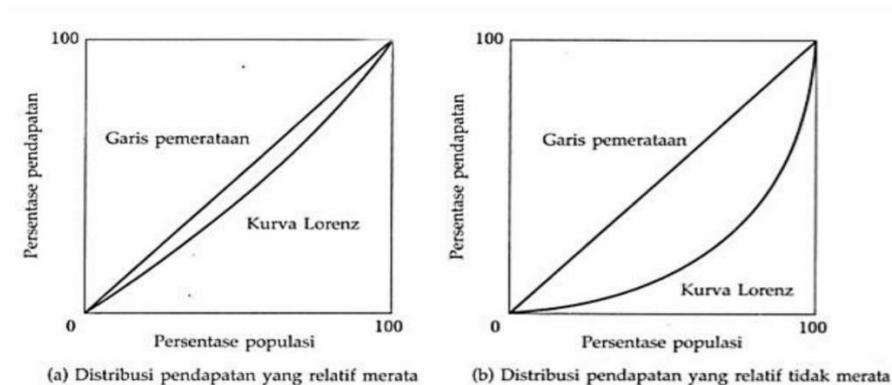
$G$  = *Gini ratio*

$F_i$  = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas

$X_{i+1}$  = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas  $i$

$Y_{i+1}$  = proporsi kumulatif pendapatan dalam kelas  $i$

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka *Gini ratio* yang besarnya sama dengan nol dan satu.



Sumber: Todaro dan Smith (2006)

### Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Secara visual, *Gini ratio* dapat dijelaskan menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif (penduduk). Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut.

Semakin besar tingkat ketimpangan, kurva Lorenz akan semakin melengkung dan semakin mendekati bagian bawah sumbu horizontal.

#### **2.1.6.2 Penyebab Ketimpangan**

Menurut Syafrizal (2017:11), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kandungan sumber daya alam tiap daerahnya berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memiliki. Ada daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam tersebut tentu saja akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif murah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.

##### **b. Perbedaan Kondisi Geografis**

Kondisi geografis yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,

perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi ini kemudian akan memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan kondisi geografis yang kurang baik akan menyebabkan relatif rendahnya tingkat produktivitas kerja. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong para investor untuk lebih memilih menanamkan modalnya di daerah yang kondisi demografisnya lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersangkutan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di daerah yang kondisi geografisnya kurang baik akan lebih rendah karena para investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

#### c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena jika mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

#### d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut kemudian akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

#### e. Alokasi Dana Pembangunan antar wilayah

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

#### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh PDRB per kapita dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta Dampaknya terhadap Kemiskinan dan

Ketimpangan (Studi Kasus 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2017-2022).

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anggun Claudia Melgiana, I Wayan Rupa dan Ni Putu Riasning (2020), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)"	Variabel independen: Dana Alokasi Khusus  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: belanja modal, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://www.ejournal.warma.dewa.ac.id/index.php/jraw/article/view/1543">https://www.ejournal.warma.dewa.ac.id/index.php/jraw/article/view/1543</a>
2	Fifi Daniati Alayda, Jamzani Sodik, Didi Nuryadin (2022), "Determinasi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020".	Variabel independen: PDRB per kapita  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen : Investasi, belanja pemerintah Kesehatan	Secara parsial PDRB per kapita, investasi, dan belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9234">https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9234</a>
3	Ulfa Nurul Hidayah, Sudati Nur Sarfiah, Jihad Lukis Panjawa (2021), "Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019".	Variabel independen: tingkat kemiskinan  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan..	Variabel tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan dan pertumbuhan ekonomi	<a href="https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/search/titles?searchPage=5&amp;searchPage=5">https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/search/titles?searchPage=5&amp;searchPage=5</a>

				tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.	
4	I Gusti Ngurah Kadek Agus Subagia, Made Suyana Utama (2022), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Bali Periode 2013-2020".	Variabel independen: Ketimpangan  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: pendapatan asli daerah, belanja modal	Secara parsial PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	<a href="https://ojs.unu.d.ac.id/index.php/EEB/article/view/85859">https://ojs.unu.d.ac.id/index.php/EEB/article/view/85859</a>
5	Joko Hadi Susilo M Kholilurrohman Zainul Hasan (2020), "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua".	Variabel independen: tingkat kemiskinan, rasio gini  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: jumlah pengangguran, jumlah penduduk	Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif sedangkan jumlah pengangguran dan rasio gini berpengaruh positif, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://stienas-y.pb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/238">https://stienas-y.pb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/238</a>
6	Eka Fitri Yanti, Lucia Rita Indrawati, dan Panji Kusuma Prasetyanto (2020), "Analisis Pengaruh PMTB, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Kemiskinan terhadap IPM di Indonesia Periode 2010-2018".	Variabel independen: Tingkat kemiskinan  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: pembentukan modal tetap domestik bruto, Pengeluaran konsumsi pemerintah	Pembentukan modal tetap domestik bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, kemudian, kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia	<a href="https://www.neliti.com/id/publications/372151/analisis-pengaruh-pmtb-pengeluaran-konsumsi-pemerintah-dan-kemiskinan-terhadap-i">https://www.neliti.com/id/publications/372151/analisis-pengaruh-pmtb-pengeluaran-konsumsi-pemerintah-dan-kemiskinan-terhadap-i</a>
7	Anastasya Tandi Datu Putry dan Antje Tuasela (2023), "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap IPM di Kabupaten Mimika".	Variabel independen: dana alokasi khusus  Variabel independen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan	Secara parsial pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan ketimpangan pendapatan	<a href="https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/408/220">https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/408/220</a>

				berpengaruh terhadap IPM.	
8	Nadhifa Ramadanisa dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022), “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung”	Variabel independen: PDRB per kapita, kemiskinan  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh, pendapatan per kapita berpengaruh terhadap, kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM.	<a href="https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SI-BATIK/article/view/121/112">https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SI-BATIK/article/view/121/112</a>
9	Puji Lestari, Sudati Nur Sarfiah, Panji Kusuma Prasetyanto (2019), “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016”	Variabel independen: dana alokasi khusus  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: dana alokasi umum, dana bagi hasil	Indeks pembangunan manusia dipengaruhi signifikan oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan. Namun secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<a href="https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/447">https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/447</a>
10	Ergi Armanda Williyen dan Maulidyah Indiria Hasmarini (2024), “Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021”.	Variabel independen: PDRB per kapita  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Jumlah penduduk miskin, PMDN, dan PMDA	PDRB per kapita, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif, sedangkan untuk variabel penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap IPM.	<a href="https://journal.s.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1913776">https://journal.s.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1913776</a>
11	Ermatry Hariani (2019), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38	Variabel independen: Indeks pembangunan manusia	Variabel independen: tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Hanya ada satu variabel yang signifikan menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu	<a href="https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB/article/download/12169/7523">https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB/article/download/12169/7523</a>

	Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015”	Variabel dependen: Ketimpangan	dan upah minimum	variabel IPM. Hal ini berarti tinggi rendahnya IPM mempunyai pengaruh pada tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan. Sementara itu, dua variabel lain yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum kabupaten / kota (UMK) tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	
12	Uhe Endang Kusuma, Asnita dan Dewi (2021), “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia 2015-2019”.	Variabel independen: dana alokasi khusus  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: PAD, DAU	PAD berpengaruh positif signifikan, DAU berpengaruh signifikan positif, dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.	Prosiding Ilmu Ekonomi, Vol 7 No 1, 2021, Universitas Islam Bandung. ISSN 2460- 6553.
13	Heniwati Gulo, Fitrawaty, Arwansyah (2023), “Analisis Pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara”.	Variabel independen: Dana alokasi khusus  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah	Secara parsial DAK, DAU dan PAD secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara dan secara simultan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<a href="https://jurnal.u&lt;br/&gt;stjogja.ac.id/in&lt;br/&gt;dex.php/sosio/&lt;br/&gt;article/view/1&lt;br/&gt;3725">https://jurnal.u stjogja.ac.id/in dex.php/sosio/ article/view/1 3725</a>
14	Rudy Darman, Dewi Rahayu (2023), “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada	Variabel independen: PDRB per kapita, tingkat kemiskinan  Variabel dependen: indeks pembangunan manusia	Variabel independen: tingkat pengangguran	Secara simultan Pendapatan Per kapita, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Berpengaruh signifikan. Secara parsial hanya pendapatan per kapita yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	<a href="http://JIEP: Jurnal&lt;br/&gt;Ilmu Ekonomi&lt;br/&gt;dan&lt;br/&gt;Pembangunan&lt;br/&gt;(ulm.ac.id)">JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (ulm.ac.id)</a>

Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2020”.					
15	Arief Hakiki, Yulmardi, Zulfanetti (2020), “Estimasi Model Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”.	Variabel independen: PDRB per kapita, Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Variabel Independen: angka partisipasi sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, belanja pemerintah di bidang kesehatan	PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan, angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh signifikan, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1910736">https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1910736</a>
16	M. Fikri Adrian, Muhammad Ikhsan Harahap (2022), “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Asahan 2016-2021”	Variabel dependen: PDRB per kapita, kemiskinan	Variabel dependen: Belanja pendidikan	PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, dan belanja pendidikan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	<a href="https://jurnal.uib.ac.id/index.php/ebma/article/view/3203">https://jurnal.uib.ac.id/index.php/ebma/article/view/3203</a>
17	Dita Ayu Anantika, Hadi Sasana (2020), “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara APEC”	Variabel independen: PDRB per kapita	Variabel independen: pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, Korupsi berpengaruh positif dan signifikan, dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC.	<a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31581">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31581</a>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh PDRB per kapita dan DAK terhadap IPM serta dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

### **2.2.1 Hubungan PDRB Per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah syarat tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang cenderung tinggi dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat (Rizqi et al., 2023).

Menurut Ramirez dalam Williyen & Hasmarini (2024) terdapat hubungan timbal balik antara *human capital* dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ramirez ini berawal dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (*human development*). Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat digolongkan menjadi 2 kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Selanjutnya untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, dimana terjadi hubungan kuat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Dan untuk kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat.

Tujuan akhir pembangunan dan kebijaksanaan yang ingin dicapai oleh suatu negara adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana kebijaksanaan tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, dalam istilah ekonomi disebut sebagai pendapatan nasional. Kesejahteraan masyarakat dapat pula diukur dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada. Hasil bagi ini disebut sebagai pendapatan per kapita atau pendapatan tiap individu (PDRB per kapita). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan begitu pun sebaliknya. Untuk mempermudah pencapaian usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator tentang kesejahteraan masyarakat. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator yang sering menjadi pokok sasaran pembangunan. Menurut Arsyad dalam Williyani & Hasmarini (2024), pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan PDRB per kapita. Kenaikan PDRB per kapita akan meningkatkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan penelitian Darman dan Rahayu (2023), Rizqi et al. (2023) dan Suhendi & Astuti (2023) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap IPM. Sehingga apabila PDRB per kapita meningkat maka IPM akan meningkat.

### **2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Khusus dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian DAK digunakan untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik, dan diharapkan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Salah satu arah kegiatan DAK adalah bidang pendidikan dengan lingkup kegiatan rehabilitasi prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan prasarana ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan sebagainya. Kegiatan ini akan menunjang sarana pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar-mengajar yang mana akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Indeks pendidikan yang meningkat akan berpengaruh pada IPM, karena menjadi salah satu indikator IPM. Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil, dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat dengan baik sesuai dengan prioritas nasional dan sesuai peraturan perundang-undangan serta menurunkan ketimpangan secara berkelanjutan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menikmati pertumbuhan yang dicapai (Datu & Tuasela, 2023).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uhe Endang Kusuma et al. (2021), Gulo et al. (2023), dan Widia (2023) yang menyatakan bahwa hubungan DAK berpengaruh positif terhadap IPM. Sehingga apabila DAK meningkat maka IPM cenderung meningkat.

### **2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Rimawan & Aryani, 2019).

Tingkat kemiskinan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Alat yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks

pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Sehingga IPM dapat memengaruhi kemiskinan (Salsabilla et.al., 2022).

Hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan penelitian dari Ferayanti et al. (2023), Sianturi et al. (2021), Mukhtar et al. (2019), Budhijana (2020), Yusuf & Dai (2020), Saragih et.al. (2022), Salsabilla et.al. (2022) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sehingga ketika IPM menurun maka akan meningkatkan kemiskinan, begitu pun sebaliknya.

#### **2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan**

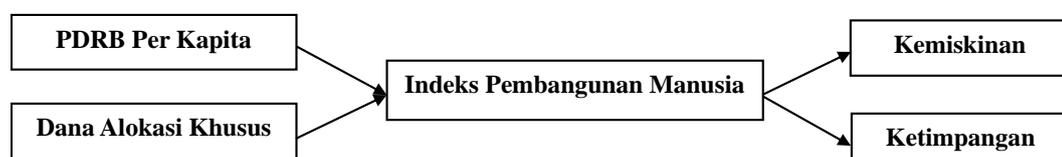
Menurut Mankiw dalam Farhan & Sugianto (2022), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Selain itu, pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Adanya peningkatan kualitas IPM disebabkan berkembang pesat pada daerah untuk memperoleh fasilitas seperti kesehatan, pendidikan yang layak. Hal itu mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih

baik sehingga layak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diterima, maka tingkat ketimpangan juga menurun (Farhan & Sugianto, 2022).

IPM dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam pembangunan daerah. Tingkat Pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan yang tinggi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang memiliki Pendidikan rendah, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi atau menghasilkan *output* yang tinggi. Oleh karena itu, semakin baiknya kualitas sumber daya manusia akan mendorong kesejahteraan manusia dan memiliki peluang tidak terjerumus dalam kemiskinan dan menekan angka ketimpangan di suatu wilayah tersebut.

Hubungan antara IPM dan ketimpangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2020), Athallah & Bintoro (2022), Lala et al. (2023), Farisha et al. (2022) yang menyatakan bahwa IPM ini berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pada suatu wilayah sehingga ketika IPM meningkat maka akan menyebabkan penurunan angka ketimpangan, begitu pun sebaliknya ketika IPM menurun maka akan meningkatkan ketimpangan.



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dikatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Maka dari rumusan masalah yang ada dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini :

1. Diduga PDRB per kapita dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2017-2022.
2. Diduga PDRB per kapita dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2017-2022.
3. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2017-2022.
4. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2017-2022.